

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang bagaimana isu LGBTQIA+ dapat menjadi suatu isu politik yang intens dan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antar dua negara yang bertolak belakang secara ideologis. Penulis mengaplikasikan teori *norm life cycle* oleh Finnemore dan Sikkink sebagai basis pada analisa dalam pertentangan interaksi antar AS dan Rusia di dalam agenda akseptansi kelompok LGBTQIA+ yang dibawa oleh AS. Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif, dimana sumber yang terdapat di penelitian ini hanya berdasar pada jurnal-jurnal, arsip kenegaraan, *press conference*, serta artikel-artikel terkait isu dan pembahasan dalam penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini berguna sebagai metode pembuktian akan adanya pengaruh Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat terhadap hubungan diplomatik AS-Rusia.

Dari data-data yang telah dikumpulkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa; *pertama* Joe Biden selaku pemimpin negara AS memiliki intensi untuk mempertahankan dan meningkatkan hegemoni negaranya dengan cara menyebarkan ideologi-ideologi liberal dengan basis Hak Asasi Manusia, dalam konteks ini dapat diartikan dengan adanya memorandum untuk menyebarkan akseptansi LGBTQIA+ secara global melalui *Memorandum on Protecting Rights of LGBTQ People Abroad* yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2021, dan memberikan “sanksi” terhadap negara-negara yang tidak ingin patuh terhadap memorandum tersebut. AS menunjukkan bahwa norma yang mereka bawa merupakan suatu hal yang harus dipatuhi secara kolektif, tanpa ada pengecualian dan negara-negara yang bersifat konservatif juga harus mematuhi norma tersebut.

kedua, Rusia yang telah sejak lama mempertahankan nilai-nilai atau norma tradisional negaranya, tentunya tidak ingin ikut dalam mematuhi norma atau seruan akseptansi kelompok LGBTQIA+ tersebut, karena kelompok LGBTQIA+ dianggap sebagai kelompok yang “tidak masuk akal” dan hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran tradisional serta Kristen Ortodoks yang juga menjadi basis dalam pembuatan kebijakan Rusia. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap seruan tersebut, dan melihat

bagaimana pengaruh dari ideologi barat yang sangat signifikan secara Internasional, Rusia merasa terancam dan pada akhirnya memberikan Internasionalisasi anti *gay propaganda*, dimana hukum tersebut ditujukan untuk melimitasi hingga menghapus pengaruh atau “propaganda” barat yang berupa kelompok LGBTQIA+. Rusia kemudian ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional tersebut ke negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Ukraina dan Belarus, dan adanya ancaman-ancaman seperti pengaruh barat yang kental di Ukraina menyebabkan pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022. Walaupun ancaman-ancaman dari AS telah dilayangkan, Rusia tetap tidak peduli dan terus memberikan Internasionalisasi anti *gay propaganda*, hingga pada tahun 2023, pemerintah Rusia secara resmi memberikan label kelompok ekstremis terhadap kelompok LGBTQIA+.

Ketiga, meskipun terdapat intensitas yang cukup panas di antara kedua negara, Rusia dan AS masih memiliki *common sense* secara diplomatik, dan keduanya masih memiliki hubungan kerja sama di beberapa bidang seperti nuclear security, nonproliferasi, keamanan regional Eropa dan Eurasia, serta perlawanan terhadap gerakan terorisme. Secara simbolis pun kedua negara masih memiliki gedung kedutaan yang menandakan adanya hubungan diplomatik dari kedua negara tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya konflik ideologi dari negara-negara tersebut tidak semata-mata memutuskan hubungan diplomatik antara kedua negara, tetapi memengaruhi bagaimana cara negara tersebut bersikap antara satu sama lain. Penyebaran norma akseptansi LGBTQIA+ oleh AS masih dianggap sebagai ancaman bagi Rusia, dan pemerintah Rusia akan terus berupaya agar hal tersebut tidak menyebar lebih luas lagi dengan menggunakan Internasionalisasi secara berkelanjutan hingga saat ini. Internasionalisasi ini juga menjadi salah satu penyebab ketegangan hubungan diplomatik antara Rusia dan Amerika Serikat.

Pertentangan serta berbagai interaksi yang terjadi di dalam agenda politik LGBTQIA+ ini kemudian dapat ditelaah melalui teori *norm life cycle*, dimana *Norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink merupakan salah satu teori yang paling dikenal dan merupakan awal dari perkembangan teori *norm life cycle*. Finnemore dan Sikkink menjelaskan kemunculan norma-norma baru dan pergeseran norma yang berdasar pada beberapa pertanyaan utama seperti dari mana norma-norma itu berasal, bagaimana norma-norma itu berubah, dan apa peran yang dimainkan norma dalam perubahan politik.

Jika dikorelasikan dengan dinamika hubungan LGBTQIA+ dapat disimpulkan bahwa akseptansi kelompok LGBTQIA+ merupakan bentuk dari suatu norma yang disebarkan oleh AS (selaku *norm entrepreneur*) secara Internasional melalui *speech act* Joe Biden pada *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Persons Around the World*. Akseptansi kelompok ini diperkenalkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *awareness* dalam isu anti-diskriminasi terhadap kelompok LGBTQIA+ selaku kelompok marjinal. *Speech act* ini merupakan aksi nyata dari *norm emergence* AS dalam agenda penyebaran akseptansi LGBTQIA+.

Dalam agenda ini, *norm emergence* telah berhasil dilewati, dan akseptansi LGBTQIA+ telah terbentuk di tengah-tengah masyarakat Rusia. Tahap selanjutnya setelah *norm emergence* adalah *norm cascade* atau tahap penyebaran norma. *Norm cascade* dapat digambarkan dengan adanya akseptansi di masyarakat, atau masyarakat yang sudah mengenal norma tersebut, dan tidak ada pertentangan dalam masyarakat mengenai kehadiran norma tersebut. Namun kemudian, adanya hambatan berupa aturan atau kebijakan pemerintah yang absolut, menyebabkan adanya pertentangan akseptansi norma di dalam tahap *cascading*. Rusia yang menentang keras adanya eksistensi kelompok LGBTQIA+ di masyarakat menyebabkan tidak adanya bentuk internalisasi norma secara legal (pembuatan peraturan, atau bentuk kebijakan perlindungan terhadap kelompok tersebut).

B. Saran

Karena penelitian ini hanya berfokus pada interaksi antara kedua negara dalam agenda politik LGBTQIA+ semenjak dari *Memorandum on Protecting Rights of LGBTQ People Abroad* yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2021, maka penelitian kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dari ekspansi politik.